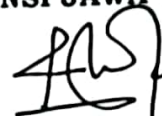


LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang,

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



SLAMET, AK

Pembina Tingkat I

NIP.19660215 198603 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam periode satu tahun anggaran berikutnya dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Gubernur yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD lima tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD. Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yang merupakan tahap kelima dalam pentahapan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2018-2023. RKPD Tahun 2023 merupakan tahapan terakhir periode pembangunan daerah jangka menengah pada tahun 2023. Untuk itu, pada tahun 2023 diperlukan langkah-langkah percepatan yang akan memastikan tercapainya pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Renja BPKAD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang sifatnya lebih operasional dan menjadi salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Selain itu, dalam pelaksanaan Renja BPKAD nantinya pada tahun berjalan, akan menjadi acuan dalam melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja BPKAD yang akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP).

Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2023 dilakukan dengan mendasarkan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, serta dinamika permasalahan yang sekiranya akan dihadapi pada tahun 2023. Dalam menyusun Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya dalam rangka pencapaian sasaran dan target pada Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan penganggaran yang akan direncanakan nantinya akan tetap selaras, konsisten dan sinkron dengan target kinerja pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

1.1.1 Proses Penyusunan

Renja BPKAD Tahun 2023 mengacu pada rumusan kerangka awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, untuk itu penyusunannya dilakukan secara simultan dan paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD tahun 2021 dan evaluasi kinerja pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2018-2023, selanjutnya Renja BPKAD Tahun 2021 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD Tahun Anggaran 2023 dalam sebagai salah satu bagian dalam penyusunan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

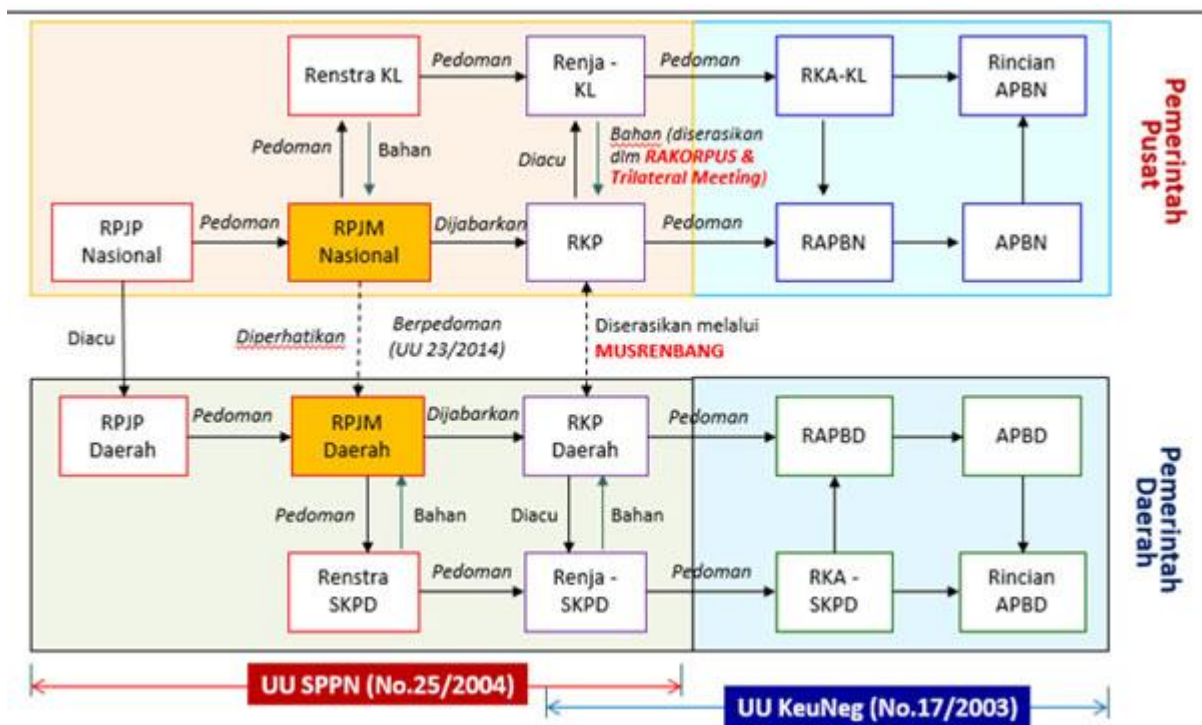
- a. Persiapan penyusunan, meliputi:
 - 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
 - 2) orientasi mengenai Renja PD;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Penyusunan rancangan awal, Ranwal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, Ranwal Renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi Renja PD tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5) penutup.
- c. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan;
- e. lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja PD;
- f. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
- g. Penetapan.

1.1.2 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis, dan Renja K/L serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan APBD

Renja BPKAD Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan pada penjabaran rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Untuk itu, diperlukan keterpaduan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan yang terpadu dan sistematis, sehingga seluruh dokumen-dokumen perencanaan yang disusun haruslah ada keterkaitan satu sama lain.

GAMBAR 1.1

KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN SESUAI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

n. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Mempermudah pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023;
- d. Menjamin adanya sinergitas, konsistensi, keterkaitan dan keserasian antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Sedangkan tujuannya penyusunan Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan dan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah yang tertib, efektif, efisien, terukur dan konsisten.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pencapaian visim misi dan tujuan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan tolok ukur dalam mengukur serta mengevaluasi Kinerja pegawai dalam lingkup BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah:

- BAB I Pendahuluan
Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisi uraian ringkas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisi tentang penjelasan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatif untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024.
- Bab V Penutup
Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Renja Perubahan BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Urusan Penunjang Keuangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Urusan Keuangan						
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100	100
		2. Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
		3. Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Persentase realisasi serapan APBD	93	93,96	92	94,28	102,48
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah OPD yang Menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan	43	43	43	43	100
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	35	35	35	35	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang terlayani penerbitan SP2D dan diproses pencairannya	41	41	41	41	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	41	41	41	41	100
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	72,50	70,23	67,50	72,84	107,91
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	20	21	4	5	125
		Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	43	43	100
		Jumlah Aset yang diamankan	41	41	41	41	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	25	11	5	4	80
		NON URUSAN					
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90	100	90	90	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90	100	90	90	100
		Kegiatan Administrasi Keuangan					
		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	20	4	4	4	100
		Kegiatan Administrasi Umum					
		Jumlah Kendaraan Operasional	20	-	20	20	100
		Jml bln terpenuhinya Jasa komunikasi, Air & Listrik PD	12	12	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas / Operasional	12	12	12	12	100
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor	125	25	25	15	80
		Jml layanan informasi publik bid keu dan aset daerah	25	5	5	5	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan PD	12	12	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga PD	12	12	12	12	100	
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100	
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan PD	12	12	12	12	100	
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat PD	12	12	12	12	100	
		Jenis Pakaian Dinas yang diadakan	10	2	2	0	0	
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	6	0	2	2	100	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	20	5	5	5	100	
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran PD	12	12	12	12	100	
		Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/Bintek/Seminar	250	82	50	75	150
		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	25	10	5	5	100
		Kegiatan Penyusunan Dok. Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	25	10	5	5	100

Tabel 2.2
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan					
4	Urusan Keuangan					
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100	100	100	100
		2. Persentase penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100
		3. Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100	100	100	100
		4. Persentase realisasi serapan APBD	93	92	92	98,92
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah OPD yang Menyusun	43	43	43	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
		dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan				
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan	35	35	35	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah OPD yang terlayani penerbitan SP2D dan diproses pencairannya	41	41	41	100
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan	41	41	41	100
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemanfaatan aset daerah	72,50	70	72,84	100,47
		Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset	20	4	4	100
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD	43	43	43	100
		Jumlah Aset yang diamankan	41	41	41	100
		Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa	25	5	20	80

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
	NON URUSAN					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	90	90	90	100
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	90	90	90	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	20	4	16	80
	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Operasional	20	20	20	100
		Jml bln terpenuhinya Jasa komunikasi, Air & Listrik PD	12	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas / Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas / Operasional	12	12	12	100
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor	125	25	100	80
		Jml layanan informasi publik bid keu dan aset daerah	25	5	20	80
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan PD	12	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	100
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan PD	12	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	12	100
		Jenis Pakaian Dinas yang diadakan	10	2	4	40
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	6	2	3	50
		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	20	5	15	75
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/Bintek/Seminar	250	50	200	80
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	25	5	20	80
	Kegiatan Penyusunan Dok. Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	5	20	80

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan, Persentase penetapan APBD tepat waktu, Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu, dan Persentase realisasi serapan APBD, pada tahun 2021 realisasi capaian kinerjanya telah sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan untuk indikator kinerja Persentase realisasi serapan APBD melampaui target sehingga capaiannya kinerja sebesar 102,48%. Sedangkan, pada tahun 2022 tingkat capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah diproyeksikan akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Persentase pemanfaatan aset daerah dan didukung dengan 4 (empat) Kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kegiatan Penatausahaan BMD, Kegiatan Pengamanan Aset Daerah, dan Kegiatan Penyelesaian Kasus Sengketa Aset, pada tahun 2021 tingkat capaian kinerjanya sebesar 107,91% dengan realisasi sebesar 72,84% dari target sebesar 67,50%. Tingkat capaian kinerja yang tinggi tersebut dikarenakan jumlah pemanfaatan aset pada pengelola dalam bentuk pemanfaatan sewa mengalami peningkatan dari 29 aset di tahun 2020 menjadi 32 aset di tahun 2021. Pada tahun 2022, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diproyeksikan tetap akan melampaui target yang ditetapkan dengan proyeksi sebesar 72,84% dari target yang ditetapkan sebesar 70,00% karena perhitungan capaian Program Barang Milik Daerah adalah akumulatif sehingga proyeksi realisasi tahun 2022 mengikuti realisasi tahun 2021 yang sebesar 72,84%.

Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2021 tingkat capaian kinerjanya sebesar 100% dengan hampir semua realisasi indikator kinerja Kegiatan Pendukungnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan kecuali untuk penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah yang tercapai 60% dan pengadaan pakaian dinas yang pada tahun 2021 tidak diselenggarakan serta terdapat 1 (satu) kegiatan yang melampaui target yaitu Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang tercapai 150%. Pada Tahun 2022 tingkat capaian kinerjanya diproyeksikan 100% dengan target dan realisasinya sebesar 90%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Indikator Kinerja pada urusan Penunjang bidang Keuangan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
1	Persentase Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan			100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penetapan APBD tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase realisasi serapan APBD			92	92	93	94,28	92	93	95	
B	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Persentase Pemanfaatan Aset			67,5	70	72,5	70,23	72,84	70	72,5	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam mewujudkan tercapainya fungsi strategis dimaksud, BPKAD Provinsi Jawa Tengah terkait langsung dengan pelaksanaan misi ke 2 (dua) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyiapan aparatur yang berkompeten, berdedikasi tinggi, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Disamping hal tersebut, perlu dipersiapkan pula sarana dan prasarana penunjang pemerintah serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam rangka pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Mengacu pada dokumen Renstra PD, BPKAD melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) kepada kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten/Kota dan *stakeholder*. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan administrasi keuangan, berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan jenis pelayanan administrasi keuangan, antara lain: a) Pelayanan perbendaharaan di bidang pencairan anggaran; b) Pelayanan konsultasi bidang perpajakan, tabungan pensiun (taspen), BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan, dan perbankan; dan c) Pelayanan evaluasi APBD dan pembinaan pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di bidang pelayanan administrasi barang milik daerah, BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah memberikan pelayanan pada proses pengamanan BMD melalui sertifikasi, pemagaran, pemberian patok batas dan label serta mekanisme pemindahtanganan dan penghapusan BMD. Selain itu, terkait pelaksanaan penyelenggaraan haji di Jawa Tengah, BPKAD mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan, khususnya penyediaan tempat (embarkasi) sebagai sarana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Dalam rangka pelaksanaan administrasi keuangan dan BMD tersebut di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Dinamika regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berpengaruh terhadap pemahaman SDM, khususnya pelayanan administrasi keuangan yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kurang optimal, antara lain: kurangnya pemahaman pengelola/pengurus BMD dalam menginventarisasi BMD yang berakibat pada data BMD yang tidak komprehensif dan masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD.
3. Peningkatan sarana penunjang penyelenggaraan haji di Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas Gedung penginapan dan fasilitas transit (embarkasi) pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.

Berkenaan dengan isu dinamika regulasi bidang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut berdampak pada ketidaksesuaian dokumen penganggaran/APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah mengacu pada regulasi terbaru dan pemutakhiran sistem informasi keuangan daerah serta melaksanakan langkah koordinasi dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada bidang layanan administrasi BMD, dampak yang muncul antara lain: 1) Pemanfaatan BMD yang tidak maksimal; 2) Masih adanya laporan BMD yang dikuasai oleh pihak lain tanpa izin pengguna/pengelola BMD yang berakibat pada konflik sengketa terhadap pihak lain dan lepasnya penguasaan/kepemilikan BMD; dan 3) Laporan BMD yang tidak valid yang berpotensi terhadap hasil opini/tanggapan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tantangan yang dihadapi BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan yang membutuhkan langkah percepatan, dan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui kebijakan *cashless* dan *paperless* yang masih dilaksanakan secara bertahap yang harus didukung dengan pengintegrasian sistem informasi;

2. Kebijakan penyetaraan fasilitas pelayanan haji pada Asrama Donohudan setingkat hotel, masih terkendala perencanaan sarana dan prasarana serta dukungan pendanaan;
3. Optimalisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam bidang urusan keuangan Daerah
4. Penyelesaian Kebijakan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum 100%; dan
5. Pemetaan dan Visualisasi Data Informasi Barang Milik Daerah pada SIM Aset secara komprehensif.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan Keuangan dan Aset Daerah pada 2 (dua) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.
3. Adanya dinamika regulasi kebijakan Pemerintah dalam Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mendorong penerapan pelaksanaan kebijakan *paperless* dan *cashless*.

Mengacu pada isu, permasalahan, tantangan, dan peluang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan Langkah-langkah strategis antara lain:

1. Melakukan penyesuaian produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan daerah dan percepatan koordinasi/pembinaan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten/Kota; dan
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan administrasi keuangan dan BMD, termasuk di dalamnya fasilitas penyelenggaraan haji Asrama Donohudan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu atas Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				9.113.812.140	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				9.014.145.181	
A	Bidang Keuangan				9.092.324.228	Bidang Keuangan				8.968.457.681	
I	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	Persentase Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100%	529.520	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jawa Tengah	Persentase Kab/Kota yang Menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	100%	7.485.190	
			Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	9.432.773			Persentase penetapan APBD tepat waktu	100%	9.432.773	

			Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.066.376			Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.066.376	
			Persentase realisasi serapan APBD	95%	2.408.021			Persentase realisasi serapan APBD	95%	2.408.021	
			Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100%	9.075.887.538			Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu	100%	9.075.887.538	
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	Persentase Pemanfaatan Aset	72,50%	5.010.819	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Tengah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	72,50%	5.010.819	
B	NON URUSAN				36.477.093	NON URUSAN					
I	Program Penunjang Urusan	BPKAD	Persentase ketercapaian administrasi	80%	3.138.362	Program Penunjang Urusan	BPKAD	Persentase ketercapaian administrasi	80%	3.138.362	

Pemerintahan Daerah Provinsi		elayanan Perangkat Daerah			Pemerintahan Daerah		elayanan Perangkat Daerah				
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	205.480			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	205.480		
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	33.133.251			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	33.133.251		
Total Keseluruhan				9.133.812.140	Total Keseluruhan				9.133.812.140		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada BPKAD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN Keuangan					
USULAN NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta (iii) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023, mengacu kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi kinerja RKPD, prioritas nasional dalam rancangan awal RKPD, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah melalui RKP Tahun 2023 telah mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 adalah

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
- 4) Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produyktivitasl
- 6) Ekonomi hijau;dan
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Sehubungan dengan prioritas nasional diatas, telah ditetapkan sasaran pembangunan pada tahun 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,378, indeks pembangunan manusia 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen. Selain itu terdapat indikator pembangunan yaitu Nilai Tukar Petani antara 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan 105-107.

Sehubungan dengan target dan sasaran prioritas nasional tersebut, Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagai target dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dalam pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Persentase Penurunan Konflik SARA sebesar 15.00 persen;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00 persen;
- 3) Angka Kemiskinan antara 9,51 - 9,29 persen;
- 4) Indeks Gini sebesar 0,34 persen;
- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,63 - 4,80 persen;
- 6) Pertumbuhan Ekonomi antara 5 - 5,60 persen;
- 7) Inflasi pada angka 3,0 + 1 persen;
- 8) PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
- 9) Indeks Williamson sebesar 0,56;
- 10) Nilai Tukar Petani 104,05;
- 11) Indeks Pembangunan Manusia 72,75;
- 12) Indeks Pembangunan Gender 92,21; dan
- 13) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,57.

Dengan telah ditetapkannya target dan sasaran pembangunan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2023 akan lebih mengarahkan dalam sisi pengelolaan keuangan daerah untuk dapat melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengelolaan barang milik daerah agar dapat dikelola dengan lebih tertib dalam menunjang tugas dan fungsi pada SKPD Pemerintah Jawa Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta indikatornya yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100
2	Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	72,5
3	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	80
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	80

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2023, BPKAD Provinsi Jawa Tengah menjalankan 3 (tiga) Program, yang meliputi :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan keuangan daerah provinsi, yang meliputi :

- a. Proses atau tahapan penyusunan dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan APBD Induk Tahun Anggaran 2023, melalui kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk penyusunan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada seluruh perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, termasuk didalamnya koordinasi dengan para stakeholder terkait seperti Perbankan, TASPEN, BPJS dan pelaporan pajak di Kantor Pajak. Aktivitas ini dilaksanakan melalui (1) kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan (2) Kegiatan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah;
- d. Melaksanakan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, meliputi dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Perubahan APBD Tahun 2023 dan APBD Induk Tahun 2024. Selain itu termasuk juga aktivitas pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan di Kabupaten/Kota. Berbagai aktivitas ini ditunjang melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Penatausahaan dana transfer ke Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berupa Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023. Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 ini, merupakan program yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal aktivitas pengelolaan aset daerah di seluruh Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya sebagai “Pengelola Barang Milik Daerah”. Adapun aktivitasnya meliputi Perencanaan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengamanan dan Pemberdayaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023 ini, merupakan program yang dilaksanakan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Birokrasi baik pada Kantor BPKAD maupun pada Unit Pengelola Asrama Donohudan. Program ini merupakan aktivitas “belanja yang bersifat mengikat” yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan birokrasi selama 12 (dua belas) bulan, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan, langganan listrik, air, internet dan telepon, sarana peralatan dan perlengkapan Gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan operasional dan Gedung kantor, serta biaya logistik/makan minum pegawai.

Adapun pembiayaan aktivitas tersebut, dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan, meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, rencana program dan kegiatan pembangunan BPKAD Provinsi Jawa Tengah dalam menunjang prioritas pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2024 dituangkan sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
												2023				
												Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah													36.477.093.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Nilai Kepuasan Masyarakat										%	80			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah											3.343.842.000			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah								%	80	3.343.842.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								3.343.842.000			
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah					%	80	3.138.362.000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						300.000.000			
								Dokumen laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Dokumen	1	300.000.000		Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
				X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				100.000.000			

									Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	100.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			X.XX.01.1.06.08					Fasilitas Kunjungan Tamu				49.950.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu	Bulan	12	49.950.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
			X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.050.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	150.050.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.295.185.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Dokumen	1	2.295.185.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
			X.XX.01.1.08.01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.200.000		
									Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	1.200.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
			X.XX.01.1.08.02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				722.000.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	722.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
			X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.571.985.000		

									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	1.571.985.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH --> BOYOLALI
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					543.177.000		
							Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tahun	1	543.177.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
			X.XX.01.1.09.02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				130.000.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Bulan	12	130.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			X.XX.01.1.09.05					Pemeliharaan Mebel				30.000.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel		Bulan	12	30.000.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				202.842.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Bulan	12	202.842.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			X.XX.01.1.09.11					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				180.335.000		

									Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	180.335.000	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B	
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD				Dokumen	100	205.480.000	SEKRETARIAT	
			X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						205.480.000		
							Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun			Dokumen	10	205.480.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
			X.XX.01.1.01.01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				124.800.000		
								Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun		Dokumen	5	124.800.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			X.XX.01.1.01.07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80.680.000		
								Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD		Dokumen	1	80.680.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Perangkat Daerah										33.133.251.000		
			Nilai Kepuasan Masyarakat							%	80	33.133.251.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							33.133.251.000		

						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah				%	100	33.133.251.000	SEKRETARIAT	
			X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.233.942.000		
							Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			Dokumen	4	28.233.942.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.091.241.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN		Bulan	12	24.091.241.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.072.701.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN		Bulan	12	4.072.701.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.04					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				30.000.000		
								Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi Perangkat Daerah		Dokumen	1	30.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang disusun		Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.06					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.000.000		

									Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan Keuangan yang disusun	Dokumen	1	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.02.07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			15.000.000		
									Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	18	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
			X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						150.000.000		
							Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Dokumen	1	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.05.04						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			100.000.000		
									Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.05.09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000.000		
									Jumlah ASN yang mengikuti diklat/workshop/seminar	Orang	20	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.000.000.000		
							Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			Dokumen	1	2.000.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

			X.XX.01.1.06.01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				150.000.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	0	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
			X.XX.01.1.06.02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				700.000.000		
									Jumlah unit Penyediaan Peralatan Kantor	Unit	0	700.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
									Jumlah unit Penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.06.03					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				150.000.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.06.05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				150.000.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	12	150.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.06.08					Fasilitasi Kunjungan Tamu				299.500.000		
									Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	299.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.06.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				550.500.000		

									Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	550.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650.000.000		
							Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dokumen	1	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				650.000.000		
								Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	0	650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					840.200.000		
							Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dokumen	1	840.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		
								Jumlah bulan pemenuhan pelayanan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah		Bulan	12	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08.02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				394.400.000		

									Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	394.400.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.08.03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125.000.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	125.000.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.08.04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				310.800.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	310.800.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.259.109.000		
							Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dokumen	1	1.259.109.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.09.01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				908.309.000		
								Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	908.309.000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.09.06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				213.000.000		

									Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	213.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
			X.XX.01.1.09.09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			137.800.000		
									Jumlah Unit Gedung yang direhab	Unit	4	137.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah												5.010.819.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase pengelolaan barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah									%	72,5		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Terwujudnya Manajemen dan Administrasi Barang Milik Daerah										5.010.819.000		
			Persentase Tata Kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan							%	72,5	5.010.819.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							5.010.819.000		
						Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah				%	72,5	5.010.819.000	Bidang Aset Daerah	
				5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						5.010.819.000		
							Jumlah Aset pengelola yang dimanfaatkan			Unit	62	33.099.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

				5.02.03.1.01.10					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				33.099.000		
									Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah pada aset pengelola yang termanfaatkan	Unit	1		33.099.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	42		1.093.148.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	
				5.02.03.1.01.06				Inventarisasi Barang Milik Daerah					1.018.148.000		
								Jumlah Dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Provisi Jawa Tengah		Dokumen	41		1.018.148.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.03.1.01.12				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					75.000.000		
								Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah		Dokumen	42		75.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Dokumen perencanaan barang milik daerah yang tersusun		Dokumen	41		900.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
				5.02.03.1.01.03				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					700.000.000		
								Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	41		700.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.03.1.01.08				Penilaian Barang Milik Daerah				200.000.000			
									Jumlah Dokumen hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	2	200.000.000	SUB BIDANG PERENCANAAN PENGADAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
								Jumlah Dokumen updating data pengadaan dan mutasi Barang Milik Daerah		Dokumen	4	550.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH		
				5.02.03.1.01.05				Penatausahaan Barang Milik Daerah				350.000.000			
									Jumlah Updating system Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	Jenis	41	350.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				5.02.03.1.01.11				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				200.000.000			
									Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan bahan penyusunan Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	OPD	41	200.000.000	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH DAN STATUS PENGGUNAAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
								Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah		Unit	233	2.434.572.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH		
				5.02.03.1.01.04				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				219.000.000			
									Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	219.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				5.02.03.1.01.07				Pengamanan Barang Milik Daerah				1.698.870.000			

									Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang label kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Unit	15	165.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang pagar kepemilikan	Unit	3	192.500.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									Jumlah Barang Milik Daerah yang telah terpasang patok	Unit	15	84.975.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									Jumlah Barang Milik Daerah yang telah tersertifikasi atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sertifikat	180	1.256.395.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.03.1.01.09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.000.000		
									Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	OPD	41	100.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.03.1.01.10				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				416.702.000		
									Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah lingkup Pemeintah Provinsi	Dokumen	1	101.822.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

										Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	49.880.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
										Jumlah Dokumen Penghapusan Barang Milik Daerah lingkup Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	265.000.000	SUB BIDANG PERUBAHAN STATUS HUKUM DAN PENGAMANAN ASET DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik													9.092.324.228.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan										%	100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Kaidah Perundangan											9.092.324.228.000		
			Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah Perundangan								%	100	9.092.324.228.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								9.092.324.228.000		
						Persentase dokumen penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu					%	100	9.075.887.538.000	SEKRETARIAT	
				5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							9.075.887.538.000		

							Jumlah dokumen belanja transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			Dokumen	1	9.075.887.538.000	SUB BAGIAN KEUANGAN		
				5.02.02.1.05.08					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			2.762.453.750.000			
										Jumlah dokumen alokasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa	Dokumen	1	2.762.453.750.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.05.09					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			23.100.000.000			
										Jumlah dokumen pengelolaan dana darurat dan mendesak	Dokumen	1	23.100.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.05.10					Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			6.290.333.788.000			
										Jumlah dokumen dana bagi hasil Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota	Dokumen	1	6.290.333.788.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
							Persentase Evaluasi APBD kabupaten/kota yang tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan				%	100	529.520.000	SEKRETARIAT	
				5.02.02.1.02			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					529.520.000			
								Jumlah Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota			Dokumen	105	529.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				5.02.02.1.02.02					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			121.086.000			

									Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD induk Kabupaten/Kota	Dokumen	35	121.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.03					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			121.086.000		
									Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Perubahan Kabupaten/Kota	Dokumen	35	121.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.04					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			121.086.000		
									Jumlah dokumen evaluasi Raperda dan Raperkada APBD Pertanggungjawaban Kabupaten/Kota	Dokumen	35	121.086.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.05					Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			103.039.000		
									Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan asistensi pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten/Kota	35	103.039.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.02.08					Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			14.466.000			
										Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	14.466.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.09					Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			14.466.000			
										Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	14.466.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.02.10					Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			14.466.000		
									Jumlah Kabupaten/Kota yang terlayani konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	35	14.466.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.02.12					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			19.825.000		
									Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	14.950.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
									Jumlah dokumen Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	4.875.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

						Persentase Penetapan APBD tepat waktu				%	100	9.432.773.000	Bidang Anggaran	
				5.02.02.1.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					9.432.773.000		
							Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan			OPD	12	3.189.473.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.01.07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				990.200.000		
									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	15	990.200.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1.496.000.000		

									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	15	1.496.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.09					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			703.273.000		
									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	15	703.273.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan		OPD	15	2.321.925.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	
				5.02.02.1.01.07					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			428.125.000		

										Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	12	428.125.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.08						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			1.596.600.000		
										Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	12	1.596.600.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.09						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			297.200.000		
										Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	12	297.200.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

							Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun Dokumen Penganggaran sesuai kaidah perundangan			OPD	14	3.921.375.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				5.02.02.1.01.07				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3.491.375.000		
									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	OPD	14	3.491.375.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.01.08				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				160.000.000		
									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	OPD	14	160.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.01.09					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				270.000.000		
										Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan bahan penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	OPD	14	270.000.000	SUB BIDANG ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu					%	100	4.066.376.000	Bidang Akuntansi	
				5.02.02.1.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						4.066.376.000		
								Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Dokumen	1	617.324.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.04.08					Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				617.324.000		
										Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	617.324.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Dokumen	3	205.388.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	

				5.02.02.1.04.03					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				33.934.000		
									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	17		33.934.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.04					Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				171.454.000		
									Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	3		171.454.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai		OPD	12		604.163.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.04.02					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				136.200.000		

									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	12	136.200.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			5.02.02.1.04.03						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			45.750.000		
									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	12	45.750.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			5.02.02.1.04.05						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			171.913.000		

									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	12	171.913.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			5.02.02.1.04.09						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			22.500.000		
									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	12	22.500.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
			5.02.02.1.04.11						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			227.800.000		

									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	12	227.800.000	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai		OPD	17	756.704.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	
				5.02.02.1.04.02				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				36.484.000		
								Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		OPD	17	36.484.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.04.05					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			230.370.000			
										Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	17	230.370.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.09					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			208.200.000			
										Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	17	208.200.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.04.11					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			281.650.000		
									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	17	281.650.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu, lengkap dan diungkap secara Memadai		OPD	15	1.667.368.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.04.02					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			61.500.000		
									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	OPD	15	61.500.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.04.03					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				137.000.000		
										Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra terhadap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	OPD	15	137.000.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.04.05					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				1.249.400.000		
										Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra dalam penyampaian bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	OPD	15	1.249.400.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

				5.02.02.1.04.09					Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60.209.000		
									Jumlah Perangkat Daerah pada lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi dalam penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	OPD	15	60.209.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
				5.02.02.1.04.11					Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				159.259.000		
									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	OPD	15	159.259.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	
								Jumlah Penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah		Tahun	3	113.095.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN		
				5.02.02.1.04.07					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				113.095.000		
									Jumlah penyelesaian Kerugian Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	3	113.095.000	SUB BIDANG PEMERINTAHAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH	

							Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi			OPD	7	102.334.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.04.12				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				102.334.000		
								Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terfasilitasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi		OPD	7	102.334.000	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi serapan APBD				%	95	2.408.021.000	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
				5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						2.258.021.000		
							Jumlah OPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan			OPD	19	699.096.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
				5.02.02.1.03.06				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				650.006.000		

									Jumlah Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	OPD	35	650.006.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.03.10					Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			49.090.000		
									Jumlah Dokumen Kebijakan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2	49.090.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah OPD Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan perundangan		OPD	22	782.752.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	
				5.02.02.1.03.03					Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			612.212.000		

									Jumlah Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terfasilitasi penerbitan Dokumen Anggaran Kas dan SPD	OPD	0	612.212.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.03.09					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			170.540.000		
									Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait pada Perangkat Daerah	Dokumen	0	170.540.000	SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESRA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
								Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sesuai ketentuan.		OPD	41	776.173.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	
				5.02.02.1.03.01					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			776.173.000		
									Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Daerah	Dokumen	41	776.173.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				5.02.02.1.06				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				150.000.000		
									Jumlah OPD yang diproses Pencairan	OPD	41	150.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	

				5.02.02.1.06.02					Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			150.000.000		
									Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	OPD	41	150.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH												9.133.812.140.000		

BAB V

PENUTUP

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan yang teridentifikasi kedalam rencana target kinerja dan pendanaan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan tahun 2023. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Menyusun perencanaan secara cermat sesuai kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan risiko pengalihan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak;
2. Melaksanakan seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan dengan memperhitungkan secara cermat capaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian target kinerja dari program/kegiatan yang telah ditetapkan disertai pendampingan sebagai langkah tindak lanjut atas kinerja yang belum mencapai target.

Dalam rangka mengantisipasi ketidaksesuaian antara rencana dan capaian target kinerja maka perlu ditetapkan langkah-langkah tindak lanjut pada Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan apabila terjadi kebijakan *refocusing* anggaran;
2. Melakukan penyesuaian kebutuhan anggaran sebagai tindak lanjut dinamika regulasi khususnya bidang keuangan dan aset daerah;
3. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman regulasi mengenai keuangan dan aset daerah.

Renja BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya perbaikan dari segi kualitas perencanaan program/kegiatan, agar dalam implementasinya dapat diterapkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi aparatur, dukungan pendanaan, dan komitmen seluruh elemen pendukung organisasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023.